



Negara Harus Berbagi dengan Pengusaha

ARIEL HERYANTO

Proses transisi di mana negara makin mundur dari pusat kekuasan. Demikian Ariel Heryanto, pengamat politik dari Universitas Satya Wacana melihat gejala politik saat ini dan mendatang. Ariel lebih menegaskan, itulah proses transisi menuju masyarakat pasca-Orde Baru. Dalam proses transisi ini ditandai dengan semakin menurunnya peran negara dalam proses pembangunan. Untuk memahami lebih jauh perkiraan politik di masa depan, berikut wawancara H. W. Setiawan dari TIRAS dengan Ariel Heryanto. Petikannya:

■ **Perkembangan politik apa yang paling substantif selama tahun 1995?**

Perkembangan politik paling penting selama tahun lalu, atau katakanlah selama dua-tiga tahun terakhir, adalah suatu transisi menuju apa yang sebut sebagai pasca-Orde Baru.

■ **Transisi bagaimana yang Anda maksudkan?**

Maksudnya begini. Saya melihat masyarakat Orde Baru pada intinya merupakan masyarakat yang berpusat pada kepemimpinan aparatus negara. Itu terjadi pada hampir semua bidang kehidupan kita. Kalau dilihat ke belakang, dalam pembangunan jembatan atau rumah sakit, dulunya negara yang berperan. Sekarang, terjadi peralihan. Dalam hal ini, negara makin lama makin mundur dari kedudukannya sebagai pusat. Dia memang masih penting, masih dominan, tapi tidak menjadi pusat lagi.

■ **Apa yang menyebabkan posisi negara melemah?**

Karena dipaksa. Dipaksa oleh dinamika kapitalisme global. Dan luar biasa itu. Dinamika ini sebetulnya berpusat justru di Asia Timur dan Asia Tenggara. Jadi, sementara yang dulu disebut sebagai pusat-pusat kapitalisme dunia, seperti Eropa Barat dan Amerika Utara, itu malah kedodoran. Saya membaca laporan-laporan perkembangan ekonomi dunia itu di Asia Timur dan Asia Tenggara yang luar biasa.

■ **Dengan melemahnya posisi negara, perubahan apa yang akan dialami oleh para elite politik di sekitar pusat kekuasaan?**

Pusat kekuasaan, saya katakan lagi, beralih dari birokrasi negara, baik sipil maupun militer. Kalaupun tidak turun atau tidak kehilangan kekuasaan, minimal mereka harus berbagi dengan pengusaha. Di DPR itu bukan cuma jumlah ABRI yang berkurang. Tapi profesional dan pengusaha di sana sekarang ini bertambah. PP 20/94, itu suatu "Supersemar" dari kekuasaan negara ke modal asing dan modal domestik.

■ **Dalam perubahan serupa itu, sejauh mana nantinya kekuatan politik masyarakat bisa disalurkan?**

Dalam masa transisi seperti ini, represi-represi itu mengendor. Tapi, kelonggaran-kelonggaran ini bisa berlalu secara sia-sia, kalau masyarakat umumnya *nggak* peka dan *nggak*

memanfaatkannya dengan baik. Kita bisa bayangkan *nggak*, orang dituduh OTB malah menantang suruh buktikan. *Nggak* pernah ada yang seperti itu dulu. Begitu pula sekarang, banyak orang membentuk ormas macam-macam. Itu kan kelonggaran.

■ **Bila kelonggaran tak dimanfaatkan secara tepat, apa akibatnya?**

Kalau kelonggaran-kelonggaran itu kita sia-siakan, dia akan tertutup lagi. Yang *mutup* bukan Deppen atau intel, tapi kapital. Konfliknya itu begini. Anda kerja di pers. Suatu kali Anda *nggak* boleh memuat sesuatu. Bukan karena dilarang, tapi yang punya modal di majalah Anda menganggap sesuatu itu *nggak* layak diberitakan.

■ **Dengan cara pandang seperti itu, bagaimana kemunculan organisasi-organisasi massa baru bisa dijelaskan?**

Itu juga merupakan contoh luapan-luapan dari sisa-sisa imajinasi masyarakat Orde Baru. Dulu kan *nggak* boleh. Sekarang diperbolehkan, seneng saja mereka. Tapi mungkin sudah *nggak* ada artinya. Bukan *nggak* ada artinya, tapi *nggak* terlalu strategis maksud saya.

■ **Artinya?**

Artinya *nggak* memberikan sumbangan apa pun untuk transformasi sosial. Dengan kata lain, yang *gitu-gitu* *nggak* istimewa. Tapi, karena sudah lama *nggak* ada, orang jadi kaget, lalu orang senang.

■ **Dengan perkembangan seperti itu, apakah pemerintah akan melakukan deregulasi di bidang politik?**

Kalau dari segi logika pemerintah, tentu saja mereka *nggak* senang. Mereka lebih senang tetap di pusat kekuasaan. Tapi, mereka *nggak* mampu. Mereka *nggak* mempunyai cukup daya untuk mengelola negara sekompelks Indonesia. Dan ini terjadi di banyak negara lain juga. Dengan demikian, mereka harus bermitra dengan swasta.

■ **Apakah perkembangan seperti itu, dengan sendirinya berarti demokratisasi bisa lebih berkembang di masa mendatang?**

Jelas. Cuma demokratisasi yang tentu saja timpang, lebih menguntungkan mereka yang punya modal, atau mereka yang mengelola modal tanpa memiliki, yakni kalangan profesional. Jadi *nggak* merata. Tapi pasti ada.

■ **Artinya, masyarakat kebanyakan tetap tak punya wahana buat menyuarakan kepentingan mereka?**

Persis. Walaupun di dalam masa transisi yang longgar ini yang satu mundur, yang lain belum maju. Tapi, itu *nggak* berlangsung lama. Kalau begitu terus, nanti akan ada penguasa yang baru. Kalau bukan birokrasi negara, kapital atau korporasi. T